

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Riwayat Hidup Amien Rais

M. Amien Rais lahir di kota solo pada tanggal 26 April 1994, merupakan anak dari suami istri Suhud Rais dengan Sudalmiyah. Keluarga Beliau berasal dari keluarga yang taat dalam beragama dan juga aktivis Muhammadiyah. Ayahnya Suhud Rais merupakan lulusan Mu'allimah Muhammadiyah yang semasa hidupnya bekerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Departemen Agama, dan menjadi anggota Dewan Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah di Surakarta. Sedangkan ibunya, merupakan lulusan Hogere Inlandsche Kweelkschool (HIK) Muhammadiyah yang setelahnya menjadi aktivis Aisyiyah (Organisasi Kewanitaan Muhammadiyah) dan juga pernah menjabat sebagai ketuanya di Surakarta pada kurun waktu dua puluh tahun. Beliau bekerja sebagai pengajar di Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) dan juga Sekolah Bidan Aisyiyah Surakarta. Karena banyaknya prestasi beliau di dunia pendidikan, maka Suldamiyah diberi gelar Ibu Teladan se-Jawa Tengah, dan juga aktif dalam Partai Politik Masyumi pada tahun 1950-an.¹

Pendidikan yang dijalani Amien Rais dimulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK) yang dijalani di sekolah Muhammadiyah. Amien mulai Sekolah Dasar pada tahun 1950 dan lulus di tahun 1956 yang dilanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP) dan lulus pada tahun 1959, lalu berlanjut ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yang selesai pada tahun 1962. Amien juga masuk dalam pendidikan Agama di Pesantren Mambaul Ulum, dan juga pernah menjadi santri di Pesantren Al Islam.²

Setelah lulus SMA, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dengan mengambil jurusan Hubungan Internasional dan lulus dengan gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 1968. Selanjutnya, Amien Rais mendapat beasiswa

¹ Nadjib, Muhammad. 1999. *Melawan Arus (Pikiran Dan Langkah Politik Amien Rais)*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. Hal. 51

² Nadjib, Muhammad. 1999. *Melawan Arus (Pikiran Dan Langkah Politik Amien Rais)*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. Hal 51

untuk melanjutkan pendidikannya demi mendapatkan gelar (M.A) di Universitas Notre Dame, Amerika Serikat. Beliau berhasil lulus dan meraih gelarnya pada tahun 1972. Dalam jangka waktu yang pendek, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Chicago, Amerika Serikat dan memperoleh gelar Ph.D dalam bidang Ilmu Politik pada tahun 1981. Pada saat penelitian disertasinya tersebut, Amien juga menyempatkan untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Mesir, dan mendapatkan gelar Mahasiswa Luar Biasa (MLB) pada tahun 1978-1979.

Sejak kecil Amien selalu berada dalam lingkup tradisi dan budaya modern barat. Dimana, hal itu bisa dilihat dari latar belakang kehidupan beliau pada saat kecil dan perjalanan pendidikannya yang banyak mempengaruhi pemikiran beliau kedepannya. Ibu beliau lahir dan juga dibesarkan dalam pendidikan Barat model Belanda. Ibu Amien Rais menekankan pola dan juga sistem kebudayaan barat seperti kejujuran, disiplin, transparansi, dan kepercayaan diri di muka umum.³ Pola dan sistem itu semakin melekat terhadap beliau ketika dibesarkan dalam lingkup Muhammadiyah yang dikenal sebagai sebuah organisasi modern. Melanjutkan studinya ke Amerika, Amien semakin berhubungan dengan budaya Barat. Beliau mulai mengenal budaya Amerika lebih mendalam khususnya mengenai nalar dan juga demokrasi yang bersumber dari buku-buku dari koleksinya. Selama di Amerika, beliau juga bertemu dengan Syafii Ma'arif dan Nurcholis Majid sehingga menjadi teman diskusi akan banyak hal mengenai Indonesia, demokrasi, dan kemiskinan.⁴

Pada saat di Amerika, potensi intelektualitas Amien Rais banyak berkembang karena banyaknya fasilitas dan akses serta partner yang lebih mendukung. Amien beserta teman-temannya pada masanya pernah mendirikan wadah intelektual di Yogyakarta bernama *Limited Group* bersama Profesor Mukti Ali berperan sebagai mentornya. *Limited Group* ini merupakan wadah intelektual yang dihormati karena di dalamnya merupakan perkumpulan tokoh-tokoh

³ Kuat, M. Najib dan. 1998. *Amien Rais Sang Demokrat*. Jakarta: Jakarta Gema Insani, hal. 18-19

⁴ Kuat, M. Najib dan. 1998. *Amien Rais Sang Demokrat*. Jakarta: Jakarta Gema Insani, hal. 137

akademisi dan para aktivis pada zamannya.⁵ Budaya modern Barat ini mempengaruhi sebagian besar intelektualitas Amien yang menjorok pada rasionalitas pemikiran, baik pemikiran keagamaan, ataupun social politiknya. Hal tersebut bisa dilihat ketika konteks pemikiran pada sosial, politik, dan keagamaan selalu mengupas hal seperti kemiskinan, fundamentalisme politik dan lainnya.

Memasuki tahun 1985 sampai 1989, Amien Rais menduduki jabatan Ketua Majelis Tabligh dan anggota Pengurus Pusat Muhammadiyah di Jakarta.⁶ Tahun 1990, Amien Rais mempelopori atas lahirnya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam berupa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dimana beliau juga menjadi satu dari 40 orang yang menandatangani pendirian ICMI dan menjabat sebagai ketua Dewan Pakar dan juga Asisten 1 Ketua Umum. Memasuki Tahun 1993, Beliau diangkat menjadi Ketua Pemimpin Pusat (PP) Muhammadiyah.⁷

Sebelum berangkat ke Amerika Serikat, beliau pernah menjadi dosen tetap di Fakultas Fisipol UGM pada tahun 1970. Setelah pulang dari Amerika Serikat, beliau kembali mengajar dan sempat menjabat sebagai Ketua Jurusan Hubungan Internasional. Beliau tidak hanya menjadi dosen di Fisipol UGM tetapi juga mengajar di pasca sarjana UMY. Selain itu, Amien Rais juga sempat menjabat sebagai Rektor 1 pada bidang akademik dan juga kepala LP3M (Lembaga Penelitian dan Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat) di UMY. Akan tetapi, Pada tanggal 23 Agustus 1998 Amien Rais mulai membangun sekaligus memimpin Partai Amanat Nasional (PAN) sehingga beliau mengundurkan diri dari staf pengajar di UGM dan sebagai rektor 1 di UMY. Partai ini memiliki wacana dalam pembaharuan yang bersifat transparan dan tidak membatasi dan mengekang akan kemajuan bangsa, identitas, suku, ras ataupun agama.⁸ Pada tahun 1999, Amien mulai menjabat sebagai Ketua Majelis

⁵ Kuat, M. Najib dan. 1998. *Amien Rais Sang Demokrat*. Jakarta: Jakarta Gema Insani, hal. 138

⁶ Rais, Muhammad Amien. 1999. *Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta*. Bandung: Mizan, hal. 5

⁷ Rais, Muhammad Amien. 1999. *Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta*. Bandung: Mizan, hal. 73

⁸ Kuat, M. Najib dan. 1998. *Amien Rais Sang Demokrat*. Jakarta: Jakarta Gema Insani, hal. 7

Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, yang mana merupakan lembaga tertinggi sistem pemerintahan secara konstitusional sebagai lembaga rakyat menurut UUD 1945.

Selain menjadi akademisi, beliau juga merupakan seorang cendekiawan. Pemikiran beliau banyak disalurkan melalui kegiatan seminar, diskusi maupun menulis. Maka dari itu Amien sempat menjabat sebagai pemimpin umum pada majalah Proaktif, Inovasi, Suara Muhammadiyah, dan ikut serta dalam berdirinya majalah umum Republika yang kemudian menjadi dewan redaksi dan menjadi penulis tetap. Sekian lama di Amerika Serikat, Amien Rais membawa pemikiran baru yaitu sebuah pemikiran yang logis dan juga rasional. Pemikirannya yang tidak pernah berhenti tersebut yang membuat Amien Rais mengumpulkan teman-temannya untuk berdiskusi untuk membangun institusi yang diberi nama PPSK (Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan). Beliau juga mendirikan Yayasan Sholahudin UGM dan menjabat sebagai ketua pada yayasan tersebut, dimana dalam yayasan tersebut berdiri sebuah pondok pesantren bernama Budi Mulia. Budi Mulia merupakan tempat untuk orang-orang yang ingin belajar ilmu umum dan agama. Pada hal lainnya juga, Amien merupakan pelopor lahirnya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan ikut serta sebagai dewan pakar.⁹

2. Karya-Karya Amien Rais

Amien Rais merupakan sosok yang senang membaca buku-buku dan membuat dirinya sebagai tokoh yang mempunyai wawasan luas kekinian. Membaca buku merupakan kebiasaan beliau, termasuk membaca buku-buku bernuansa politi, ekonomi, sejarah, ataupun buku-buku yang mempunyai wawasan mengenai keagamaan dan sosial. Kesenangan ini lah membuat beliau berakhir mengeluarkan pemikiran-pemikirannya kedalam tulisan.

Sebagai seorang akademis dan juga cendekiawan, kontribusi Amien dalam dunia penelitian, pemikiran, dan juga pendidikan cukup banyak. Banyaknya ide-ide pemikiran beliau tertuang dan terpublikasikan kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Islam di Indonesia melalui surat

⁹ Ahmad Bahar, Amien Rais. 1998. *Gagasan Dan Pemikiran Menggapai Masa Depan Indonesia Baru*. Yogyakarta: Pena Cendekia, hal. 14

kar, artikel, dan juga karya-karya beliau yang berbentuk buku-buku.

Adapun karya-karya Amien Rais secara global yang diterbitkan dalam bentuk buku, sebagai berikut:

a. Selamatkan Indonesia

Buku ini berisi mengenai pengakuan Amien Rais jika dirinya mengutarakan usulan, kritikan, dan ulasan. Amien menyatakan jika buku sebagai kritikan tajam terutama pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam kata pengantar buku ini tertulis jika masalah terbesar Indonesia yang masih melekat adalah kemiskinan, keterbelakangan, dan kemajuan yang tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Dan faktor utamanya adalah nasionalisme bangsa Indonesia yang belum luas, dan hanya bergerak pada penampilan luarnya.

Buku ini juga menyindir mengenai monopoli asing terhadap aset-aset nasional Indonesia. Banyaknya sumber daya alam (SDA) yang dikuasai oleh negara-negara adidaya. Kehadiran Presiden Amerika Serikat George W Bush pada akhir tahun 2006 merupakan contoh kelatihan pemimpin Indonesia yang masih mewarisi mental inlander. Pengamanan yang diberikan kepada Presiden Amerika saat ke Indonesia sedikit berlebihan dan memalukan, karena tidak ada negara manapun di dunia yang menyambut Presiden Bush seperti Indonesia, seolah Indonesia merupakan negara protektorat Amerika Serikat.

Buku ini juga tertulis mengenai adanya doktrin globalisasi yang mendorong negara-negara di dunia untuk menggabungkan ekonomi mereka ke dalam ekonomi global tunggal. Doktrin tersebut meliputi adanya: *Liberalisasi* perdagangan dan juga arah keuangan, modal dan pasar tenaga kerja, pengurangan produksi, dan menyusutkan peran negara terutama yang mempunyai kaitan dengan program pembangunan sosial dan juga ekonomi. Kebijakan yang cenderung menghapuskan kedaulatan negara-negara yang mempunyai pertahanan yang lemah nasionalnya dan melahirkan kesenjangan akan negara kaya dan negara miskin, serta membangun ekonomi yang eksploitatif. Karena Indonesia merupakan negara yang dipaksa akan

kehilangan kedaulatan ekonominya dikarenakan pernah didikte dan juga didominasi International Monetary Fund (IMF) setelah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1990-an.¹⁰

b. Islam di Indonesia

Buku ini beres mengenai kondisi umat islam, yang mana berisikan mengenai kemajuan dan juga kemunduran umat Islam. Buku ini berfokus akan adanya destruktif pada bidang ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Dalam buku ini tinjauan utamanya yaitu masalah percaturan politik di Indonesia, dikarenakan Islam merupakan masalah yang begitu sensitif sekali hingga mendorong tokoh pemikiran untuk turun dalam mempelajari dan memahami kajian politik dan Islam terutama di Indonesia, dalam hal ini, Amien rais membagi pembahasan-pembahasan mengenai tema tersebut sebagai berikut: Bagian pertama, berisi mengenai anatomi cendikiawan-cendikiawan muslim Indonesia yang menjabarkan mengenai berbagai adil dan tanggung jawab cendikiawan muslim baik dalam masalah ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan mengenai proses perkembangan pemikiran masyarakat Indonesia. Dilanjutkan bagian dua, berisi mengenai Islam di Indonesia menyangkut tentang definisi. Pada bab selanjutnya, beliau menjabarkan mengenai potensi krisis umat Islam di Indonesia. Bagian empat, berisi mengenai profesionalisme Islam sebagai alternative kepada fundamentalisme dan oportuniste. Dimana bab lima, berisi mengenai moral agama dan juga masalah kemiskinan sebagai pengantar mengenai visi dan misi Islam yang ikut serta dalam lingkup pembangunan. Bagian enam, berisi mengenai Islam dan aspek-aspek pembangunan yang berisikan mengenai konsep Islam berkaitan dengan kerja dan juga aktualisasi nilai-nilai ajaran Islam, di dalam masyarakat serta hubungan dengan moral pembangunan. Bagian tujuh, mengenai dinamika kepemimpinan Islam selama masa Orde Baru. Bagian delapan, berisi mengenai Islam di Indonesia yang

¹⁰ Rais, Mohammad Amien. 2008. *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK Press.

berkaitan dengan perspektif perkumpulan cita dan realisasinya. Bagian Sembilan, berisi mengenai respon cendekiawan muslim kepada tuntutan masyarakat. Dan bagian akhir, berisi mengenai teori tentang cara untuk berfikir, bertindak, dan juga bersikap.¹¹

c. Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta

Buku ini merupakan buku pertama Amien Rais, buku ini berisikan mengenai kumpulan tulisan-tulisan beliau yang dimuat di berbagai media masa. Fokus isi buku ini menjelaskan mengenai masalah, seperti masalah negara, tauhis, dan juga masalah politik yang melibatkan tentang pemikiran Islam di Indonesia dewasa ini. Tetapi, secara umum buku ini hanya memuat empat pokok masalah yang dibahas yaitu mengenai masalah negara, tauhid, politik. Bagian ini menerangkan tentang pengertian tauhid, fungsi tauhid, dan juga hubungan yang ada antara politik dan dakwah beserta wawasan Islam mengenai ketatanegaraan. Pada bagian lainnya memuat mengenai usaha untuk menemukan alternative Islam yang berisi mengenai sorotan krisis ilmu, sosial, dan tentang perubahan pemahaman Islam dalam pandangan serta kritik Islam kepada Marxisme yang mana didalamnya berisi mengenai pengembangan ilmu dan juga teknologi dalam Islam. Selanjutnya, berisi masalah introspeksi dan peningkatan kewaspadaan. Hal yang menyangkut keterangan tentang Islam dan radikalisme untuk menghindari revolusi dan juga gerakan tiga puluh (Gestapu) Partai Komunis Islam (PKI) beserta sorotan dalam masalah generasi muda dan politik di Indonesia. Bagian terkahir, mengenai konidis agama Islam dan posisi dunia saat ini. Bagian berisi pembahasan mengenai masalah gambaran konflik Amerika Serikan dengan Uni Soviet begitu juga dengan pengaruhnya terhadap dunia ketiga dan dunia muslim yang mana berisikan mengenai ideology Al Ikhwanul Muslimin yaitu sebuah gerakan Islam Kontemporel.¹²

¹¹ M. Amien Rais. 2008. *Islam Di Indonesia: Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*. Jakarta: Rajawali Pers. 285

¹² Rais, Muhammad Amien. 1999. *Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta*. Bandung: Mizan, hal 245-247

d. Islam dan Pembaharuan

Buku ini berisi mengenai pembaharuan dalam pemikiran Islam di Indonesia baik pada aspek politik, sosial, ekonomi, budaya ataupun pemahaman dalam bidang agama. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya efek dari prediksi publik yang menyatakan jika Islam pada zaman modern ini disebut-sebut sebagai informasi dan globalisasi, yang mana Islam mengalami stagnasi dan degradasi di dalam berbagai aspek kehidupan.

Masalah politik pembaharuan yang dimaksud tidak berasal dari ajaran Islam akan tapi berhubungan dengan masalah pemahaman dan revitalisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam hal kehidupan masyarakat yang berfokus pada bangsa Indonesia yang menjadi kajian inti pembaharuan disini menyorok kepada bentuk-bentuk penafsiran mengenai landasan budaya lokal dan macam-macam bentuk pengertian non-Islam serta ragam struktur pemerintah baik nuansa ketimuran ataupun budaya yang berasal dari Barat.

Pola pembaharuan mengenai proses pada nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan yang diperlukan adanya pembaharuan. Hal ini menjadikan pemahaman kepada ajaran Islam yang menjadi rancu dan adanya proses stagnasi pemikiran, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang tepat jika pembaharuan ini menjadi fokus dalam rangka mengrealisasikan nilai-nilai ajaran Islam didalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹³

e. Reformasi Termehek-mehek

Dalam bukunya kali ini, Amien Rais mengungkapkan pemikiran beliau terhadap reformasi yang sedang terjadi di Indonesia. Buku ini berisi mengenai kumpulan tulisan beliau, dimulai dari lengsernya Soeharto dilanjutkan oleh presiden BJ Habibie kemudian Gus Dur. Menjelaskan lika-liku agenda reformasi yang akan dicapai setelah adanya masalah yang dimulai dari kekuasaan soeharto hingga naiknya Gus Dur dan B.J. Habibie menjadi Presiden.

¹³ M. Amien Rais. 1995. *Islam Dan Pembaharuan : Ensiklopedi Masalah-Masalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Pada bagian lainnya membahas mengenai pemerintahan pada kekuasaan Gus Dur dan Habibie, yang mana berfokus kepada politik luar negeri milik Gus Dur. Melakukan penyegaran orientasi politik luar negeri ke arah Asia, terutama membangun sebuah *front* bersama yang terdiri dari RRC, Jepang, India, Indonesia dan negara Asia lainnya. Dengan harapan Indonesia bisa lebih mandiri dan lebih yakin pada kekuatannya sendiri untuk membangun masa depannya dalam segi politik luar negerinya. Pada era Habibie, masalah yang mulai muncul adalah krisis Aceh, Krisis Ambon, Krisis Tim-tim dan wilayah yang mengandung potensi konflik yaitu Irian Jaya.

Masalah-masalah yang muncul pada saat reformasi berjalan dan juga agenda agenda yang akan dijalankan Amien Rais untuk kemajuan bangsa Indonesia. Masalah-masalah yang muncul seperti adanya *money politics* pada saat pemilu mulai dijalankan, apakah pemilu di Indonesia mampu menyandang predikat berkualitas, dan lain halnya. Semakin naiknya tingkat KKN, angka kemiskinan yang semakin naik dengan pesat dan juga masalah kesenjangan sosial yang mulai terlihat secara nyata.¹⁴

Beberapa karya-karya Amien Rais berupa penelitian dan buku, antara lain: *Politik Internasional Dewasa Ini* (Surabaya: Usaha Nasional, 1989), *Demi Kepentingan Bangsa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), *Timur Tengah dan Krisis Teluk* (Surabaya: Amarpress, 1990), *Tangan Kecil* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Press-PPK, 1995), *Melawan Arus: Pemikiran dan Langkah Politik Amien Rais* (Bandung: Mizan, 1999), *Suara Amien Rais Suara Rakyat* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), *Sukses Keajaiban Kekuasaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), *Refleksi Amien Rais, Dari Persoalan Semut Sampai Gajah* (Jakarta: Gema Insani, 1997), *Berjuang Menuntut Perubahan* (Yogyakarta: PT. Mitra Pena Cendekia, 1998), *Berjuang Menuntut Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), *Prospek Perdamaian Timur Tengah 1980* (Jakarta:

¹⁴ Rais, Amien. 2000. *Reformasi Termehek-Mehek*. Yogyakarta: Aditya Media.

Litbang Deplu, 1980), Zionisme: Arti dan Fungsi (Yogyakarta: Fisipol UGM, 1989).

B. Data Penelitian

1) Pokok-pokok Pemikiran Politik Amien Rais

Dari kecil sampai dewasa, Amien Rais sudah terbiasa berada dalam ruang lingkup tradisi dan juga budaya modern Barat. Hal itu dapat dilihat melalui latar belakang kehidupan beliau yang berada dalam lingkup pendidikan dan sistem Barat Belanda, yang berujung sang ibu yang menekankan pola maupun sistem yang lebih menjorok ke kebudayaan Barat. Sistem dan juga pola modern akan terus tumbuh ketika dibesarkan dalam lingkungan Muhammadiyah yang terkenal dengan organisasi modern. Pada organisasi modern sendiri mempunyai prinsip rasionalitas yang kental dan juga dominan,¹⁵ di dalam Muhammadiyah nilai-nilai budaya dan kehidupan dalam masyarakatnya dikembangkan menurut prinsip ibadah dan rasionalitas.

Pemikiran Amien Rais tidak hanya berdasarkan pada ilmu politik Timur Tengah, akan tetapi juga kepada bidang ilmu yang lain. Beliau dikenal sebagai salah satu pemikir Islam, pemikiran-pemikiran keagamaannya menjadi bahan dalam diskusi generasi muda kampus dan juga pada pemuda Muhammadiyah. Muhammadiyah memang bukan dikenal sebagai gerakan politik keagamaan. Akan tetapi, melihat posisi Amien Rais sebagai pemimpin umat, sangat sulit untuk menghindari mengenai perdebatan-perdebatan politik. Maka, sebagai pemimpin di suatu organisasi masyarakat, beliau harus ikut andil dalam politik di Indonesia.

Berikut ini merupakan pemikiran-pemikiran Amien Rais dalam lingkup politik:

a) Pemikiran tentang Sistem Pemerintahan

Pandangan Amien Rais mengenai pemerintahan yang dibangun dengan bimbingan Islam mempunyai tujuan ganda bertipikal, yaitu menjamin kukuhnya keyakinan dan menjamin terwujudnya kepentingan rakyat. Akan tetapi, kedua hal tersebut bukan termasuk tujuan akhir, melainkan tujuan untuk mencapai

¹⁵ Kuat, M. Najib dan. 1998. *Amien Rais Sang Demokrat*. Jakarta: Jakarta Gema Insani. Hal, 18-19

kebahagiaan di akhirat.¹⁶ Tujuan yang pertama didapat melewati prinsip-prinsip legislatif, yang menaruh aturan-aturan universal yang bisa mencakup seluruh kasus secara luas. Tujuan kedua bisa dicapai melalui *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, yang merupakan politik atau kebijakan guna menerapkan syari'ah yang sesuai dengan konteks permasalahan. Dalam hal ini Syari'ah memperbolehkan penguasa untuk mencari solusi bagi masalah yang timbul secara luas, dalam artian bisa mengambil metode pemecahan dari mana saja agar dapat mencapai kesejahteraan rakyat.

Pemerintahan yang berdasar terhadap prinsip-prinsip Islam yang demokratis menurut Amien Rais mempunyai 5 hal, yaitu; *Pertama*, Pemerintahan wajib dilandasi keadilan, hal ini berarti jika tidak hanya keadilan dan persamaan didepan hukum, tapi juga keadilan sosial dan juga ekonomi. *Kedua*, sistem politik yang didasarkan pada prinsip syura dan musyawarah, yang berarti pemimpin politik merupakan abdi rakyat dan harus dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum. *Ketiga*, prinsip kesetaraan, dimana Islam tidak membedakan manusia berdasarkan etnik, gender, latar belakang, ataupun warna kulit, sosial, ekonomi dan lainnya. *Keempat*, kebebasan dalam berfikir, beragama, berbicara, mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, hak hidup di dalam kebebasan dan keamanan, dan sebagainya. Kebebasan ini merupakan sifat dasar dalam Islam, bahkan kebebasan dalam tidak beragama juga sudah ada dalam hukum Islam, selama hal itu tidak mengganggu tatanan publik. *Kelima*, Tanggungjawab para pemimpin kepada rakyat terhadap kebijakan-kebijakan mereka.

Selain prinsip-prinsip tersebut, hal yang harus menjadi prinsip dasar pemerintah adalah keterbukaan. Menurut Amien Rais, keterbukaan merupakan tujuan mutlak yang harus dipenuhi dalam pengelolaan pemerintah, khususnya dalam negara modern.¹⁷ Prinsip keterbukaan mempunyai tuntutan dalam kejujuran dari

¹⁶ Hoeran, Adzni. 2017. "Pemikiran Politik Islam Amien Rais." *Penerapan Embellishment Sebagai Unsur Dekoratif Pada Busana Modest Wear*: 1–15.

¹⁷ Nasri, Imran. 1999. *Amien Rais Menjawab Isu-Isu Politis Seputar Kiprah Kontroversialnya*. Bandung: Mizan. Hal 155

pemerintah, karena kejujuran dipandang sebagai keharusan dalam pengelolaan pemerintahan. Jika tidak adanya keterbukaan ini, bisa dipastikan akan muncul penyimpangan-penyimpangan seperti munculnya KKN yang menjadi contoh utama dalam prinsip keterbukaan ini. Maka atas dasar tersebut, Amien Rais pernah menyatakan perlunya *clean and greand coalition* dalam pemerintahan, yaitu koalisi yang anti KKN. Dimana, prinsip keterbukaan ini menuntut adanya hal yang baik dari pemerintah. \

b) Pemikiran tentang Sistem Demokrasi

Mengenai kekuasaan demokrasi di Indonesia, Amien Rais pernah berkata "*I believe in democracy 100 percent. Because democracy runs parallel; with basic Islamic teachings.*"¹⁸ Amien rais meyakini pernyataan tersebut, dengan arti lain yaitu demokrasi itu serasi dengan Islam dan tidak boleh sebaliknya, yaitu Islam serasi dengan demokrasi. Hal itu dikarenakan Islam mempunyai lingkup yang lebih luas, lebih unggul, dan lebih menyeluruh yang tidak sebanding dengan ajaran demokrasi. Islam merupakan ciptaan Allah, sedangkan demokrasi merupakan ciptaan manusia. Dalam hal ini, demokrasi tidak bertabrakan dengan ajaran Islam. Inti dari demokrasi itu musyawarah dan memilih, jika pemilihan sudah selesai maka sistem musyawarahlah yang berjalan. Dan dalam musyawarah, suatu persoalan terkadang dapat diputuskan secara utuh dan terkadang melalui voting.

Perspektif Amien Rais mengenai konsep demokrasi sendiri sebagai bentuk pemerintahan yang menomor satukan kedaulatan rakyat. Yang mana kehidupan politik dan juga pemerintahan yang mengikuti prinsip demokrasi yang sesungguhnya, bisa membawa kepada kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pandangan beliau mengenai demokrasi ini menimbulkan pemikiran mengenai kebenaran oposisi dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan dan juga ketatanegaraan yang mempunyai prinsip demokrasi pada hampir semua negara di dunia, adanya kelompok oposisi

¹⁸ M. Amien Rais. 1989. *Islam Di Indonesia: Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*. Jakarta: Rajawali Pers

diakui secara resmi sebagai kekuatan politik yang dapat menentukan. Akan tetapi, selama pemerintahan orde baru, istilah ini termasuk salah satu dari banyaknya teori politik yang tidak bisa dikenal dalam praktek demokrasi di Indonesia.

Menurut Amien Rais, demokrasi yang akurat bagi Indonesia adalah demokrasi yang tidak perlu diberi tambahan, seperti demokrasi kerakyatan, demokrasi terpimpin, demokrasi sentral, liberal dan lainnya. Demokrasi yang tepat untuk Indonesia adalah apa adanya, yaitu menonjolkan musyawarah dan voting, dengan berlakunya *one man, one vote, one value* (satu orang satu suara dan nilai).¹⁹ Demokrasi yang berkembang merupakan demokrasi yang sifatnya universal yang mempunyai ciri-ciri. *Pertama*, rakyat mengawasi para pemimpin, bukan pemimpin yang mengawasi rakyat. *Kedua*, mempunyai 4 kebebasan demokrasi yang dijamin, yaitu kebebasan berbicara, memeluk agama, dari rasa takut, kebutuhan pokok (yang harus terjamin).²⁰

Pembenaran Amien Rais menjadikan demokrasi sistem ideal yang didasarkan pada, demokrasi yang dilihat lebih bisa menjamin berjalannya mekanisme *Check and balances* antara yang berkuasa dan yang tidak berkuasa dengan mematuhi aturan secara legal-konstitusional. Dimana *sistem Check and balances* dimaksud agar trias politica (*Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif*) berjalan sesuai porsi tidak melebihi ataupun kurang dari kekuasaan yang sudah ditentukan konstitusi. Sistem politik demokratis juga memberlakukan prinsip *the people control the leaders* dan tidak sebaliknya. Amien Rais sepakat mengenai arti demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Di dalam demokrasi mempunyai wadah untuk melakukan pembagian kekuasaan dengan pihak lain untuk mencapai keseimbangan anatara kekuasaan

¹⁹ Mustakim, Bagus, and Nurhuda Kurniawan. 2010. *Amien Rais : Inilah Jalan Hidup Saya*. Yogyakarta: Yogyakarta Insan Madani. Hal 135

²⁰ Mustakim, Bagus, and Nurhuda Kurniawan. 2010. *Amien Rais : Inilah Jalan Hidup Saya*. Yogyakarta: Yogyakarta Insan Madani. Hal 52

sosial-politik, sehingga tidak melahirkan kelompok masyarakat yang menjadi warga negara kelas dua. Demokrasi juga menjamin rakyat menempatkan wakilnya pada lembaga perwakilan dengan bebas. Dan sistem demokrasi juga mempunyai aturan yang jelas yang berlandaskan prinsip-prinsip moral yang jelas juga.²¹ Dengan adanya pemahaman demokrasi seperti ini, Amien Rais merasa kecewa kepada pelaksanaan demokrasi pancasila. Yang beliau harapkan demokrasi berjalan dengan baik dari dua demokrasi yang sudah berlaku sebelumnya yaitu liberal dan terpimpin, akan tetapi aktualisasinya berbanding terbalik dengan nilai-nilai demokrasi.

c) Pandangan Tentang Agama dan Negara

Model pendekatan yang dilakukan Amien Rais mengenai hubungan Islam dan Negara berfokus terhadap pandangan intelektualnya kepada permasalahan-permasalahan yang berdasarkan agama. Beliau merupakan seorang cendekiawan yang mempunyai konsep tersendiri mengenai Negara Islam, dimana beliau mengatakan jika tidak ada negara Islam akan tetapi mementingkan bagaimana Islam dapat diterapkan dan direalisasikan ke dalam negara yang ada di dunia.²² Amien rais mempunyai dasar jika wacana mengenai negara lebih kepada konsep dasar tekstual Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang mana pemikiran Amien Rais lebih menjuru kepada dua sumber Islam tersebut ketika berbicara mengenai unsur-unsur mengenai dasar negara.

Konsep pemikiran Amien Rais mengenai negara Islam dimulai dengan negara Islam yang tidak tertulis dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena itu, tidak ada perintah di dalam Islam agar menegakkan negara Islam. Menurut beliau, Al-Qur'an dan As-Sunnah mempunyai beberapa nilai politik maupun prinsip-prinsip konstitusional yang harus ditanamkan dan dijadikan

²¹ PRAYITNO, SIGIT. 2008. "PEMIKIRAN AMIEN RAIS TENTANG POLITIK ISLAM." : 1-122.

²² Ahmad Bahar, Amien Rais. 1998. *Gagasan Dan Pemikiran Menggapai Masa Depan Indonesia Baru*. Yogyakarta: Pena Cendekia. Hal 64.

pilar-pilar dalam mengelola negara. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan, musyawarah, kebebasan, kemerdekaan, persamaan, dan pertanggungjawaban pemimpin kepada masyarakat.²³

Amien Rais juga menegaskan tidak ada negara Islam, tetapi sebuah negara harus menanamkan etos ataupun sendi Islam dalam sebuah pemerintahan. Dimana beliau tidak membicarakan mengenai formalisasi Islam, akan tetapi lebih mementingkan fungsi dan manfaat penerapan ajaran Islam kedalam sistem penyelenggaraan pemerintah. Menurut pemikiran Amien Rais, membangun sebuah negara yang terlepas dari dasar-dasar Islam sama saja dengan mendirikan negara yang sekuler, dengan kecenderungan kehidupan yang materiialistik. Beliau juga menegaskan mengenai pentingnya syari'ah yang merupakan sumber hukum ataupun pola hidup dalam masyarakat Islam.

Pada perspektif Amien Rais, masyarakat muslim harus belajar mengenai etika, norma, nilai-nilai yang bersifat pokok dengan parameter bagi kehidupan bernegara. Hubungan antara ajaran-ajaran pokok islam ini harus menjadi dasar utama dan menjadi peraturan fungsional dalam mengatur sebuah negara. Pernyataan Amien rais kepada sistem politik Islam selama ini terlihat bukan pendukung konsep negara Islam dan bukan juga pendukung negara sekuler. Hal itu dikarenakan ajaran-ajaran Islam yang sudah ada dalam syari'at juga membutuhkan negara sebagai pemegang otoritas politiknya. Dikarenakan sebuah hukum hanya dapat dilakukan jika ada otoritas yang melakukan implementasi hukum.²⁴

2) **Agenda Reformasi di Indonesia dalam pemikiran Amien Rais**

Di tengah badai krisis tahun 1998, yang memunculkan peristiwa-peristiwa besar yang berdampak sangat penting dalam kehidupan nasional. Hal tersebut memicu sejumlah

²³ Hoeran, Adzni. 2017. "Pemikiran Politik Islam Amien Rais." *Penerapan Embellishment Sebagai Unsur Dekoratif Pada Busana Modest Wear*: 1–15.

²⁴ AN, Andri Nirwana. 2021. "KONSEP ISLAMIC STATE AMIEN RAIS DAN NURCHOLISH MADJID Andri." 15(1).

kelompok, mahasiswa dan juga masyarakat yang kecewa dan berakhir dengan adanya demonstran besar-besaran untuk menuntut reformasi dengan Soeharto yang mundur dari kursi jabatannya. Sejak tahun 1982 sudah banyak kritikan yang muncul mengenai pergantian presiden, masyarakat mulai jenuh dan tidak puas dengan kepemimpinan yang berada ditempat yang sama. Kekecewaan masyarakat dimulai dengan kerusuhan menjelang dipilihnya Soeharto sebagai presiden untuk yang ketiga kali bersamaan dengan berjalannya kampanye Golkar.²⁵ Pada tahun-tahun selanjutnya, kritikan kepada Soeharto terus muncul, akan tetapi dengan nada suara yang lebih tenang karena banyak terjadi pencekalan oleh aparat keamanan yang merupakan kepercayaan Orde Baru. Bagi Soeharto, kritikan-kritikan yang muncul adalah perlawanan kepada pemerintah, akan tetapi menurut Amien Rais ide suksesi kepemimpinan yang merupakan wacana politik yang serius untuk melangkah menuju perubahan kondisi dan keadaan politik demokratis.

Amien Rais menggerakkan aksinya bersama mahasiswa terhadap krisis ekonomi yang tidak bisa disikapi secara bijak oleh pemerintah.²⁶ Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa semakin intensif dalam mengkritik pemerintahan Orde Baru ketika Soeharto mulai menjadi presiden untuk kedua kalinya. Amien Rais melakukan orasi ke kampus-kampus guna menyebarkan ide reformisnya sekaligus memberikan dukungan kepada mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi kepada krisis ekonomi yang semakin memprihatinkan.

Memasuki pertengahan tahun 1998, rezim Soeharto tidak bisa lagi menahan gelombang tuntutan reformasi sehingga terjadi peralihan kekuasaan yang diawali dengan transisi demokrasi dari sistem politik rezim Orde Baru yang mulai mengikis menuju terbukanya demokrasi sejati.²⁷

Pada tanggal 14 Mei 1998, Amien Rais dan beberapa tokoh cendekiawan mulai membangun kelompok pro-

²⁵ Santosa, Kholid O. 2008. *Perjalan Sang Jenderal Besar Soeharto*. Bandung: Segi Arsy. Hal 157.

²⁶ Aswicahyono, Haryo, and David Christian. 2017. "Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016." *Centre for Strategic and International Studies* (02): 1-16

²⁷ Sofyan, Arif. 2013. "PEMAKNAAN DEMOKRASI DI ERA REFORMASI (Opini Masyarakat Jawa Tengah Terhadap Demokrasi Saat Ini)." *Politika* 4(2): 5-13

demokrasi yang bernama Majelis Amanat Rakyat (MAR). MAR merupakan wadah kerjasama untuk organisasi dan individu yang memiliki tekad terhadap reformasi untuk demokrasi, dibentuk karena Amien Rais melihat perkembangan Indonesia yang semakin memprihatinkan dengan banyaknya masalah dan juga protes masyarakat Indonesia kepada pemerintah. Dalam tuntutanannya, MAR menyatakan tiga hal: *Pertama*, MAR mengeluarkan seruan kepada Soeharto untuk undur diri demi kepentingan bangsa sehingga proses reformasi untuk demokrasi bisa berjalan dengan lancar. *Kedua*, menyerukan untuk aparat keamanan agar tidak berlaku kekerasan kepada rakyat sehingga jika ada hal buruk dapat dicegah. *Ketiga*, memberitahu mahasiswa dan masyarakat untuk benar-benar dan secepatnya melahirkan perubahan situasi agar memulihkan kehidupan masyarakat secara wajar.²⁸

Banyaknya mahasiswa dan juga cendekiawan ikut melibatkan diri untuk mendukung pergerakan Amien Rais dalam meluruhkan pemerintahan Orde Baru. Adanya krisis moneter ini berkembang menjadi krisis ekonomi, yang kemudian meningkat menjadi krisis kepemimpinan dan semakin banyak masyarakat yang pudar kepercayaan kepada pemerintahan Orde Baru, yang berujung kepada tuntutan agar Presiden Soeharto lengser.²⁹ Tuntutan itu muncul dikarenakan kritikan Amien Rais kepada Kabinet Pembangunan VII, yang berisi kritikan ketidak mampuan dalam pengembanan tugas beratnya. Faktor lain yang muncul dalam agenda pelengseran Soeharto adalah bertambahnya masalah dengan diambilnya kabinet yang bermasalah, yaitu mereka yang mempunyai faktor kuat untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini lah yang membuat Amien Rais semakin kuat dan transparan untuk merealisasikan agenda Soeharto untuk turun dari jabatan presiden RI. Hal-hal yang sudah dilakukan Amien Rais dinilai merupakan sosok penting dalam proses reformasi. Beliau diterima dalam kalangan kampus dan juga masyarakat dalam perjuangan demokrasi.

²⁸ Prastiti, Dwi Ayu. 1390. "PERANAN AMIEN RAIS DALAM GERAKAN REFORMASI DI INDONESIA." Hal 48

²⁹ Williams, Ochi. 2008. "SISTEM POLITIK INDONESIA ERA REFORMASI." 2: 1-120.

Transisi demokrasi pada tahun 1998 ditandai dengan gerakan reformasi yang merupakan perubahan kekuatan oposisi kaum intelektual yang sudah lama melakukan kontrol moral kepada perkembangan politik era Orde Baru. Kekuatan moral yang digerakkan oleh Mahasiswa dan ditopang oleh rakyat Indonesia bisa membuat tumbang sebuah rezim yang berdiri selama lebih dari tiga dasawarsa. Antusiasme mahasiswa dan juga rakyat dalam melihat pergantian pemerintahan Orde Baru agar segera tumbang dipicu oleh adanya krisis moneter dan krisis ekonomi yang mulai berdampak hampir ke semua lapisan masyarakat. Perlawanan yang dibintangi oleh Mahasiswa dan cendekiawan untuk menuntut reformasi berhasil membuat soeharto dan rezimnya lengser setelah lama berkuasa. Datangnya reformasi yang meruntuhkan rezim orde baru ini menandakan tahapan awal untuk transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase penting karena akan menentukan kemana demokrasi ini dibangun.

Dengan adanya tahapan awal dalam reformasi yang sudah mulai tercapai dengan jatuhnya kekuasaan Soeharto, sehingga dapat diperkirakan proses reformasi total akan berjalan lebih lancar. Amien Rais berfikir jika awal mula pilihan dalam perubahan ini bukan menojorok kepada revolusi, akan tetapi reformasi yang merupakan sebuah perubahan yang tidak mempunyai sifat dramatis radikal revolusioner, tapi mempunyai tahapan secara substantif dengan menghindari berbagai hal yang bersifat kekerasan.³⁰

Akan tetapi dalam dalam euphoria politik yang sedang dialami ini, sudah mulai dihadapkan dengan berbagai macam realita yang cukup pahit. Terbukti dengan banyaknya kendala seperti KKN yang masih tetap jalan dan belum bisa ditanggulangi, sementara KKN versi baru mulai lahir menampakkan diri dan tidak menutup kemungkinan dengan skala yang lebih besar. Sebagian contohnya adalah rencana rekapitalisasi kepada bank-bank yang mendekati gulung tikar dengan nilai yang hampir menyentuh 300 triliun. Hal ini merupakan

³⁰ PRAYITNO, SIGIT. 2008. "PEMIKIRAN AMIEN RAIS TENTANG POLITIK ISLAM.": 1-122

bentuk KKN yang sangat halus, yang bisa membuat perekonomian Indonesia semakin buruk.³¹

Sementara itu, dalam hal tuntutan masyarakat luar untuk menegakkan keadilan hukum kepada setiap pelaku kejahatan kemanusiaan, yang masih sulit menemukan titik terang. Bahkan dari waktu ke waktu masih banyak bentuk-bentuk kekerasan yang begitu mudah menghilangkan nyawa. Hal ini menunjukkan jika sebagian masyarakat masih belum jera dan tidak pernah jera untuk melakukan tindak kejahatan atas sesamanya. Dilain hal, kesenjangan sosial dalam beberapa kasus semakin tinggi dan melebar, sehingga rasa keadilan rakyat masih kurang dan tidak ada tanda-tanda perubahan yang cukup menggembirakan.

Maka dengan itu, pada saat-saat seperti inilah kaum reformasi perlu melakukan spekulasi secara jujur dan juga berani, agar roda reformasi dapat digulirkan kembali. Amien Rais mengatakan jika kekuatan soeharto sangat besar, apalagi soeharto masih mempunyai kaki tangan di dalam sistem birokrasi dan lingkup ABRI. Untuk menyingkirkan hal seperti itu, hal yang dilakukan bukan dengan menarik soeharto ke tengah lapangan akan tetapi secara sistematis harus diisolasi dengan membawanya ke proses peradilan hukum yang seadil-adilnya.

Salah satu tokoh utama yang mempunyai peran besar dalam berdirinya reformasi 1998 adalah Amien Rais. Menurut beliau ada beberapa agenda reformasi yang bersifat jangka panjang sampai jangka pendek³², yaitu:

- 1) Agenda jangka pendek hanya mempunyai satu tujuan, yaitu bagaimana bangsa Indonesia dapat memasuki pemilihan umum sebagai satu-satunya cara untuk mengukur aspirasi rakyat dengan mengharapkan jika setelah pemilihan umum akan ada pemerintahan yang dapat dipercaya dan mempunyai validasi di mata rakyat Indonesia.³³ Sehingga pemerintahan baru mempunyai tonggak yang kuat untuk melangkah dan memecahkan

³¹ Komara, Endang. 2015. "Sistem Politik Indonesia Era Reformasi." *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi 2*(Desember): 117-24

³² Rais, Amien. 2000. *Reformasi Termehek-Mehek*. Yogyakarta: Aditya Media. Hal, 4

³³ Rais, Amien. 2000. *Reformasi Termehek-Mehek*. Yogyakarta: Aditya Media. Hal, 5

masalah-masalah dalam hal sosial, ekonomi, hukum, dan lainnya.

- 2) Dalam jangka menengah, yang harus dimulai dengan adanya penataan kehidupan hukum yang lebih adil. Kenyataan yang sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia ini sangat tidak sesuai dengan prinsip demokrasi mengenai peradilan yang bebas dan memihak. Hal ini dapat dilihat dari ketimpangan keadilan hukum bagi rakyat kecil. Maka dengan itu perlu adanya perubahan dalam keadilan hukum dengan membuktikan jika hak-hak rakyat kecil yang selama ini terinjak-injak oleh kekuasaan bisa dilindungi oleh hukum yang ada. Sementara, yang sempat melecehkan dan menghina jika secara bertahap harus mendapat keadilan melalui prosedur hukum yang terbuka dan wajar.
- 3) Dalam jangka panjang, yang harus dilakukan adalah menegaskan HAM yang mempunyai kepentingan seperti mendorong adanya kebebasan pers, kebebasan mimbar, kebebasan berekspresi bagi seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan jaminan UUD 1945 yang merupakan substansi dalam hak asasi manusia. Dan yang terpenting adalah agenda reformasi Amien Rais yang berfokus dalam kemajuan demokrasi di Indonesia.

Amien Rais menegaskan bahwa reformasi tidak akan pernah tercapai sesuai tujuan jika reformasi mental belum terlaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kerusakan yang terjadi pada bangsa Indonesia adalah kejiwaan, mentalitas, dan batin bangsa yang selama ini sudah dirusak oleh pendidikan orde baru.³⁴ Untuk melakukan reformasi, masing-masing para pemimpin dari ABRI, birokrasi tokoh-tokoh ulama, dan relawan serta tokoh informal baik dari kalangan kampus ataupun Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) bersama-sama harus mendemonstrasikan keinginan yang kuat dalam proses reformasi.

³⁴ Aswicahyono, Haryo, and David Christian. 2017. "Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016." *Centre for Strategic and International Studies* (02): 1-16.

C. Pembahasan

1) **Pemikiran Reformasi Amien Rais dalam Perspektif Fiqh Siyasah**

Fiqh siyasah adalah salah satu hukum Islam yang membahas tentang tata aturan dan urusan manusia dalam bernegara guna mencapai kemaslahatan. Fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari mengenai hal ikhwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dalam lingkup hukum, peraturan dan juga kebijakan yang dibuat oleh penguasa dan sejalan dengan dasar-dasar ajaran syari'at guna mewujudkan kesejahteraan umat.³⁵

Fiqh siyasah juga merupakan sistem hukum yang mempunyai dasar-dasar (fundamental), akan tetapi syari'ah hanya memberikan prinsip-prinsip dasar saja mengingat individu tumbuh secara dinamis dan mempunyai keaktivitas dan dinamika hukum. Maka dengan itu dalam syari'ah, selain tidak bisa diubah adapun bagian yang bersifat fleksibel, agar bisa memenuhi perubahan zaman yang dinamis. Di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah walaupun tidak secara tersurat berbicara mengenai demokrasi, akan tetapi secara tersirat dan umum mengandung prinsip-prinsip dan juga nilai dasar yang bisa dijadikan landasan dalam perubahan bangsa Indonesia dalam kehidupan demokrasi.³⁶ Seperti prinsip pada kepemimpinan, musyawarah, kepastian hukum dan keadilan, kebebasan, persamaan dan banyak lagi prinsip yang bisa dijadikan landasan. Nilai-nilai ini tersirat dalam Al-Qur'an yang juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau merupakan pemimpin tunggal dengan otoritas yang berdasarkan kenabian dan juga bersumber terhadap wahyu Ilahi, dan bertanggung jawab atas semua tindakan beliau kepada Tuhan.³⁷ Di mana, dalam urusan pemerintahan beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah, yang melibatkan masyarakat dalam setiap menentukan kebijakan pemerintahan.

³⁵ Zamri, Ahmad Rizaldin. 2019. *Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah.* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 1–72.

³⁶ Pulungan, J. Suyuti. 1997. *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal, 45

³⁷ Herianti. 2017. "Pemerintahan Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Aqidah-ta : Jurnal Ilmu Aqidah* 3(2): 158–66.

Pemikiran-pemikiran Amien Rais dalam reformasi di Indonesia tertuju kepada upaya penegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dengan berdasarkan tauhid. Hal tersebut dicapai dengan menggunakan pembaharuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu penerapan demokrasi, pelaksanaan pemerintah yang bersih dan pemberantasan KKN dan segala macamnya.³⁸ Sejauh ini, Islam dapat menerima sistem pemerintahan republik selama keinginan rakyat masih sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an. Maka dari itu, Islam dapat menerima musyawarah, demokrasi dan juga republik, jika parameter akhirnya adalah kebenaran dari Allah SWT. Hal itu terlihat dengan pemikiran reformasi Amien Rais yang mengutarakan perubahan dalam sistem pemerintahan Soeharto yang tidak sejalan dengan rakyat. Amien Rais juga memilik mengenai demokrasi, bahwasanya demokrasi ataupun musyawarah akan selalu benar jika dilandaskan berdasarkan wahyu. Akan tetapi, jika hanya berlandaskan pemikiran manusia, demokrasi dan musyawarah akan membelok kearah keputusan yang keliru. Sikap politik yang kritis termasuk ciri politik yang berdasarkan pada tauhid, sementara sikap politik yang tidak kritis seperti takut kepada kekuasaan disebut dengan 'syirik politik'.³⁹ Yaitu, sikap kompromi individu yang dilakukan dengan menyandarkan diri ke sesama makhluk daripada bertumpu kepada Allah SWT. Hal ini bisa dilihat dengan pemikiran Amien Rias dalam reformasi yang terjadi di Indonesia, dimana beliau mencoba bersikap kritis terhadap kekuasaan dibawah tekanan pada rezim Soeharto. Sikap kritisnya ini membuahkan pemikiran beliau terhadap gerakan reformasi yang menuntut keadilan masyarakat Indonesia dan juga perubahan dalam sistem pemerintahan yang bersifat egois terhadap kekuasaan.

Kekuasaan tidak boleh disakralkan dan didewakan karena dapat melahirkan syirik sosial dan juga syirik politik yang berujung dengan keluarnya masalah yang baru. Amien Rais mendasarkan pemikiran beliau melalui konsep dasar

³⁸ Gusmansyah, Wery. 2019. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyazah." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2(2): 123-34

³⁹ Pangestu, Agung et al. 2018. "T Injauan Fiqh Siyazah Syar ' Yah T Erhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita , Kecamatan Siantar Martoba , Kota Pematangsiantar)." : 1-135

Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah terutama dalam pemikiran reformasi milik beliau. Karena didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah memfokuskan beberapa nilai politik maupun prinsip konstitusional yang wajib ditegakkan dan dijadikan tonggak dalam menjalankan pemerintahan. Prinsip utama yang menjadi dasar negara adalah keterbukaan. Dimana, keterbukaan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam manajemen negara, khususnya dalam negara modern.

Negara tidak dapat dibangun dengan keistimewaan sebuah kelompok tertentu, yang artinya negara harus mengikutsertakan partisipasi seluruh objek bangsa sesuai kapasitas dan juga prioritasnya masing-masing. Hal ini yang menjadi fokus dalam reformasi, pandangan Amien Rais yang semakin lama semakin buruk kepada rezim Soeharto dikarenakan tidak adanya keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dan tidak melibatkan rakyat dalam setiap keputusan yang diambil pemerintah hanya untuk kepuasan dalam kekuasaan.⁴⁰ Prinsip keterbukaan itu berakhir dengan mewajibkan adanya kejujuran dalam penyelenggaraan negara, dikarenakan kejujuran dilihat sebagai kewajiban dalam mengelola negara.

Melihat persoalan yang ada selama berjalannya reformasi, pendekatan yang cocok dilakukan dalam reformasi dengan menggunakan *masalah mursalah*.⁴¹ Merupakan metode yang fokus terhadap kepentingan dalam pemerintahan sehingga terciptalah pemerintahan yang baik. Kebijakan negara harus sesuai dengan suara rakyatnya, karena jika suara rakyat tidak diperhatikan maka keputusan pemerintah tidak akan berjalan efektif. Maka dari itu, kebijakan pemerintah wajib sejalan dengan kepentingan umum, tidak untuk diri sendiri ataupun golongan.

Perubahan perlu dilaksanakan jika tidak lagi sejalan dengan rakyat dikarenakan adanya tekanan dari penguasa kepada rakyat. Perubahan juga perlu dilakukan karena mengikuti perubahan zaman, situasi, tempat, dan juga kultur dengan undang-undang yang sesuai dengan waktu.

⁴⁰ Hoeran, Adzni. 2017. "Pemikiran Politik Islam Amien Rais." *Penerapan Embellishment Sebagai Unsur Dekoratif Pada Busana Modestwear*: 1–15.

⁴¹ HAD, TAUFIQURRAHMAN. 2018. "KONSEP NEGARA HUKUM MENURUT PANDANGAN FAJLURRAHMAN JURDI DALAM PERSPEKTIF Fiqh Siyasa Dusturiyah Skripsi." 1

Perubahan tidak hanya berubah, akan tetapi berorientasi kepada nilai-nilai dan juga jadi diri manusia. Dimana muatannya tidak terbanding terbalik secara substansial dengan prinsip syari'ah yang sifatnya transparan, sehingga bisa diantisipasi jika ada perkembangan zaman dan bisa menampung aspirasi masyarakat untuk kemajuan ekonomi, politik, dan sosial budaya demi kebaikan rakyat. Pernyataan tersebut memberi sinyal kepada rakyat agar dapat mengoreksi kebijakan-kebijakan pemimpin yang tidak berdampak positif untuk kemaslahatan rakyat. Maka dari itu, rakyat diberikan otoritas untuk menyampaikan kebenaran yang merupakan tugas pemerintah. Upaya membenarkan kesalahan tersebut dilakukan sesuai tata cara *amar ma'ruf nahi munkar* (menegakkan yang benar dan melarang yang salah) yang sudah ditetapkan syari'at. Yaitu memberikan revisi dan masukan dengan teguran ataupun nasehat secara langsung. Akan tetapi, jika pemimpin atau pemerintah membelok dari aturan Islam atau melakukan hal yang merugikan rakyat, maka semua orang baik kelompok maupun individu wajib memberikan nasehat.⁴²

Menasehati pemimpin ataupun mengkritik kebijakannya yang buruk hukumnya wajib, namun cara yang digunakan beragam, dengan dilakukan secara langsung, secara tatap muka, atau tidak langsung dengan menggunakan tulisan dan surat. Akan tetapi, jika usaha-usaha seperti itu tidak memberikan hasil ataupun tidak direspon, maka rakyat dapat melakukan aksi demonstrasi. Demonstrasi merupakan langkah yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan, bisa sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk kebaikan seperti jihad. Nabi Muhammad SAW, juga pernah bersabda tentang pentingnya menasehati pemimpin yang zalim hingga perilakunya dihukum jihad. Dimana hal itu diharapkan menyampaikan kebenaran yang benar-benar ditanggapi dengan baik oleh pemerintah. Maka dengan demonstrasi tersebut rakyat telah ikut berpartisipasi dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* kepa pemerintah.

⁴² Mahmud, Musthafa. 2007. *Thahan, Pemikiran Moderat Hasan Al-Bana*. Bandung: Penerbit Harakatuna. Hal 259

2) Agenda Reformasi Amien Rais dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Indonesia memerlukan adanya pemimpin baru dari jawaban demokrasi, Amien Rais melihat adanya perubahan dan pembaharuan kepemimpinan baru sebagai langkah dari demokrasi. Beberapa alasan inilah yang membuat Amien memunculkan agenda reformasi di Indonesia, karena tingkat kemiskinan dan juga pengangguran tinggi yang juga tidak mudah untuk dikurangi. Jumlah korupsi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan jauhnya proses demokrasi yang diharapkan. Selain masalah-masalah tersebut, ada beberapa alasan lagi seperti utang luar negeri yang semakin besar dan ketimpangan hukum, serta kasus-kasus yang sarat akan konflik sosial dan bersifat sensitive.⁴³

Ahli fiqh mengatakan jika kebijakan pemimpin tidak harus mempunyai acuan yang rinci dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, karena acuan fiqh siyasah sendiri adalah kemakmuran umat, dan kemakmuran tersebut merupakan prinsip umum yang disimpulkan dari ayat-ayat dan juga Hadis Rasulullah SAW. Maka dengan itu, untuk menjalankan pemerintahan dalam sebuah negara dalam Islam, seluruh pihak wajib terlibat baik ekonom, militer, rakyat, ulama, cendekiawan dan lainnya. Jika umat tidak diikuti sertakan dan hanya penguasa yang mengambil kebijakan dalam pemerintahan, tidak akan mencapai kemaslahatan yang diinginkan semua masyarakat. Hal tersebutlah yang memunculkan kedholiman pemimpin kepada rakyatnya.

Melihat Amien Rais yang seorang demokrat, maka pemikiran-pemikiran Amien yang berfokus terhadap sistem demokrasi sangat banyak. Amien Rais setuju jika demokrasi merupakan sistem yang paling ideal pada saat ini. Demokrasi menurut Amien Rais sendiri diartikan dengan berbagai macam arti, akan tetapi tujuannya tetap sama, yaitu mengenai kedaulatan yang diberikan kepada rakyat. Melalui demokrasi ini juga dapat menghindari adanya tirani mayoritas kepada minoritas dan tirani minoritas kepada mayoritas yang saling berbahaya.

Beliau berpendapat, guna menegakkan nilai-nilai demokrasi, Indonesia tidak harus menjadi negara Islam.

⁴³ PRAYITNO, SIGIT. 2008. "PEMIKIRAN AMIEN RAIS TENTANG POLITIK ISLAM.": 1-122.

Karena menurut Amien wahyu Allah tidak menekan adanya perintah dalam Al-Qur'an dan As Sunnah untuk membangun negara Islam. Karena Al-Qur'an dan As Sunnah tidak memberikan tuntunan yang rinci mengenai struktur institusi negara seperti sistem perwakilan rakyat, hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, ataupun dengan sistem pemilihan umum. Maka dari itu, kekuasaan demokrasi di dalam sistem pemerintahan merupakan amanah yang wajib dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan juga rakyat. Yang berarti, setiap individu yang memegang kekuasaan harus mempertanggung jawabkan penggunaan kekuasaannya. Pemikiran Amien itulah yang menyatakan jika sistem kenegaraan yang demokrasi merupakan prasarana mental yang kuat.⁴⁴

Istilah demokrasi dalam Islam merupakan hal yang asing, karena sistem demokrasi tidak pernah diketahui umat muslim sejak awal. Ummat Islam hanya mengetahui kebebasan (*al hurriyah*), yang merupakan pilar utama dalam demokrasi yang sudah ada pada jaman Nabi Muhammad SAW. Yang termasuk dalam kebebasan memilih pemimpin, mengelola negara secara bersama (*syura*), mengkritik pemimpin, dan juga berpendapat. Islam sendiri juga mengungkapkan jika kebebasan berpendapat merupakan hal yang begitu penting bersifat wajib bagi umat muslim jika berkaitan dengan akhlak, peraturan dan nuga kepentingan hukum dalam hal yang dianggap kemungkaran oleh syari'at. Dengan begitu, kebebasan berpendapat merupakan kewajiban seperti yang sudah disinggung dalam Al-Qur'an yang mana jika umat yang menyerukan kepada kebijakan dalam negara, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari munkar merekalah orang yang beruntung.⁴⁵

Selama meluapnya tragedi reformasi 1998, Amien Rais menjadi salah satu pemimpin gerakan tersebut. Puncaknya terjadi pada 14 Mei 1998, pada saat Amien Rais membangun sebuah Majelis Amanat Rakyat (MAR) untuk menambah kekuatan politik guna melawan hegemoni pemerintahan

⁴⁴ Prastiti, Dwi Ayu. 2000. "PERANAN AMIEN RAIS DALAM GERAKAN REFORMASI DI INDONESIA."

⁴⁵ Fahrizal. 2020. "TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP KEMERDEKAAN BERKUMPUL DALAM MENGELUARKAN PENDAPAT." *Strategi Pemasaran Pedagang dalam Persaingan Bisnis udang di Kec. SUPPA Kab. Pinrang (Perspektif hukum Ekonomi Syariah)*. Hal, 54

Soeharto. Setelah jatuhnya Soeharto, kiprah Amien Rais dan tokoh lainnya menjadi awalan untuk era demokrasi kebebasan berpendapat di Indonesia. Islam juga memberikan kebebasan kepada umatnya untuk selalu menggunakan pikirannya, sejauh tidak membelok dari batasan yang sudah ditentukan Allah dalam Al-Qur'an. Rakyat bebas dalam mengadakan pertemuan-pertemuan, dan juga negara tidak boleh melarang hak tersebut kecuali melakukan pelanggaran secara nyata. Islam memberikan keterbukaan dan kebebasan berpendapat dalam segala hal yang berfokus pada semua hal, baik urusan umum ataupun kelompok. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu fokus penting sebuah negara demokrasi. Karena demokrasi mempunyai arti kebebasan dalam memilih dan menilai dalam hal kebebasan berpendapat, berkelompok, ataupun berserikat.

Kebebasan berpendapat ini dimulai dengan pemikiran Amien Rais mengeluarkan substansinya mengenai kemajuan demokrasi dengan agenda-agenda reformasi milik beliau yang berjangka pendek sampai berjangka panjang, yaitu:

a. Agenda reformasi jangka pendek

Agenda jangka menengah ini mempunyai satu kepentingan yaitu mengenai pemilihan umum yang merupakan cara untuk mengukur aspirasi rakyat Indonesia. Dalam Islam metode dalam pemilihan umum sudah ada pada masa *khulafaur Rasyidin*, dimana saat itu merupakan acuan dalam menjalankan sistem pemerintahan dalam Islam.⁴⁶ Perkara memilih pemimpin dalam ketatanegaraan merupakan sebuah kewajiban, Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah membahas mengenai pemilihan pemimpin merupakan hal yang hukumnya wajib. Dalam Islam kekuasaan diberikan kepada rakyat, dimana rakyatlah yang mempunyai hak dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin untuk menjalankan negara.

Pemilihan umum di Indonesia dan pemilihan umum dalam Islam merupakan dua sistem yang berbeda secara teknis implementasinya, tapi disatu sisi memiliki persamaan dalam substansinya. Pemilihan di dalam Islam mempunyai dua cara, yaitu dipilih oleh *ahlul halli wal-*

⁴⁶ Herianti. 2017. "Pemerintahan Indonesia Dalam Perspektif Siyash Syar'iyah." *Aqidah-ta : Jurnal Ilmu Aqidah* 3(2): 158–66.

'*aqdi* (melalui badan perwakilan rakyat) dengan menyerahkan mandat dari kepala negara yang sebelumnya. Sedangkan pada pemilihan umum sistem proporsional rakyat tidak memilih secara langsung calon-calon nya.⁴⁷ Dimana rakyat hanya memilih tanda gambar dengan minimnya pengetahuan mengenai calon yang diajukan pada pemilihan.

Sistem politik Islam pada dahulu menggunakan tidak menggunakan pemilihan secara umum dengan prosedur yang ketat. Prinsip yang ada di dalam islam adalah syura (musyawarah), yang mana syura merupakan tumpuan kehidupan bermasyarakat bernegara yang digunakan sebagai prinsip yang harus menjadi pilar di muka bumi ini. Esensi musyawarah sendiri memberikan kesempatan untuk rakyat menggunakan hak berpartisipasi dalam membuat keputusan, baik dalam aturan-aturan hukum maupun kebijaksanaan pemerintah.

b. Agenda reformasi jangka menengah

Agenda jangka menengah ini dimulai dengan keadilan dalam hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia selama rezim Soeharto sangat terbilang buruk karena tidak adanya kesetaraan hukum untuk rakyat Indonesia. Landasan hukum Indonesia berada pada prinsip Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan mengenai keadilan tertulis dalam sila terakhir pancasila yang berbunyi 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia', yang mana keadilan dalam hukum juga hal yang harus diperhatikan. Dalam perspektif Islam, keadilan mempunyai banyak arti akan tetapi juga mempunyai benang merah yang menghubungkan. Seperti yang sudah tertulis dalam AL-Qur'an di mana ada 3 kata yang mempunyai arti sama dalam keadilan yaitu, al-'adl, al-qitsih, dan al-mizan.⁴⁸

Dalam ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak mengatur jalannya nomokrasi Islam secara terbuka, karena Islam hanya mengatur hal umum tetapi juga berfokus kepada prinsip

⁴⁷ Fadhilatul Husni. 2019. "Kebebasan Bereksprei Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah." 3(1): 1-12.

⁴⁸ Wahyu Abdul Jafat. 2018. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3(1): 18.

nomokrasi. Nomokrasi Islam sendiri yaitu suatu negara hukum yang merujuk kepada hukum Islam.⁴⁹ Konsep keadilan juga merupakan substansial dalam nomokrasi Islam, keadilan dalam Islam mempunyai pengertian yang lebih bermakna karena berlandaskan AL-Qur'an. Keadilan dalam hukum menurut pandangan Islam tidak, memandang adanya perbedaan bangsa, bahasa, budaya dan agama karena Islam mewajibkan pemerintah dalam menegakkan keadilan, dan berlaku dengan adil atas kebijakan yang diambil untuk rakyat. Seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an, An-Nisa (58)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Dimana ayat ini memperlihatkan dalam tanggung jawab untuk menjalankan amanah yang ada kepada semua individu, dan menjalankan keadilan dalam hukum sesuai undang-undang yang ada serta menetapkan hukum yang hanya dikhususkan oleh individu-individu tertentu.

c. Agenda reformasi jangka panjang

Dalam agenda jangka panjang ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai demi suksesi dalam menjalankan reformasi.⁵⁰ Dalam keadaan menurunnya legitimasi, muncullah agenda reformasi sebagai solusi dalam perubahan. Sikap dalam reformasi disuarakan oleh

⁴⁹Devi Apriani. 2020. “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KONSEP WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA.” 1.

⁵⁰ Rais, Amien. 2000. *Reformasi Termehek-Mehek*. Yogyakarta: Aditya Media.

banyak kalangan, Amien Rais mulai menyuarkan agenda beliau dengan harapan adanya perubahan ke dalam demokrasi di Indonesia. Urgensi yang ada dalam agenda reformasi jangka panjang yaitu adanya,

- 1) Kebebasan pers, Kebebasan pers merupakan unsur penting dalam pemerintahan sebuah negara, Karena pers merupakan tujuan dari *amar ma'ruf nahi munkar* yang mana dalam Islam merupakan sebuah tanggung jawab bersama.⁵¹ Maksudnya adalah, jika terjadi kemungkaran tetapi tidak ada yang berusaha untuk melarang maka Allah akan memberi hukuman kepada semua umat. Tapi apabila tidak melakukan kemungkaran karena bersikap pasif tanpa berusaha melakukan sesuatu, tidak akan mendapat sanksi. Media dalam menjalankan salah satu *amar ma'ruf nahi munkar* ini juga bisa menggunakan media massa. Media massa mempunyai fungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi secara luas. Hak dalam mendapatkan informasi masuk dalam hak asasi manusia dan merupakan sarana untuk pengawasan politik di negara.⁵²

Walaupun kebebasan pers mempunyai dasar hukum dalam Islam, akan tetapi kebebasan yang dimaksud harus memiliki batasan. Pers mempunyai fungsi menyampaikan dan menerima informasi, tetapi hal tersebut dibatasi dengan pers yang dilarang digunakan untuk menyebar fitnah dan hal-hal yang bersifat buruk. Islam juga mendukung dan mendukung perlindungan kebebasan pers sebagai alat media dalam menyebar kebaikan dan mencegah keburukan. Aturan tersebut tertulis dalam sumber tertinggi hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Islam mempunyai sifat yang fleksibel sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman yang terus maju, sehingga bisa menjalankan kegiatan dalam perjuangan Islam lewat media elektronik.

⁵¹ Fadhilatul Husni. 2019. "Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah." 3(1): 1–12.

⁵² Azra, Azyumardi. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dengan menyampaikan kritik dan pendapat terhadap kinerja pemerintah.⁵³

- 2) Kebebasan berekspresi, merupakan hak dalam mencari, menyebarkan informasi dan pemikiran dalam bentuk apapun, dan dengan cara apapun. Jika kebebasan pers berfokus kepada media sosial, maka untuk kebebasan berekspresi bisa melalui lisan, tertulis melalui materi audiovisual, ekspresi budaya, ataupun politik. Kebebasan berekspresi juga mendukung adanya hak dalam kebebasan dalam berpikir, beragama, dan juga berkeyakinan. Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang merupakan hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional negara sendiri merupakan hak hukum warga negara yang dilindungi oleh negara yang berdaulat.

Di hukum Islam yang menjadi fokus dibuatnya peraturan yaitu untuk memberi kebaikan bagi umat. Kebebasan berekspresi dalam Islam sangat dihargai, sehingga individu yang berani untuk mengungkapkan pendapatnya dengan lantang dan benar di hadapan pemimpin yang otoriter atau tiran dinilai sebagai perjuangan yang mulia.⁵⁴ Islam juga menjamin kebebasan berpendapat untuk setiap orang dengan maksud untuk mewujudkan tujuan syari'at, dengan syarat pendapatnya sesuai dengan akidah syari'at Islam, dan tidak membelok dari akidah syari'at dengan alasan kebebasan berpikir. Dalam Fiqh sisayah juga disebutkan untuk berekspresi dengan etika yang baik seperti tidak berbicara buruk atau kotor, menghina, menyimpangkan pendapat orang lain, dan menuduh tanpa bukti. Pendapat harus keluar sesuai dengan syari'at iakidah Islam. Islam juga membahas mengenai kebebasan dalam beragama, dalam ajarannya juga menyinggung mengenai kebebasan individu untuk memilih satu

⁵³ Devi Apriani. 2020. "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KONSEP WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA." Hal, 30.

⁵⁴ Nur, Amialia Rizqi. 2021. "Analisis Fikih Siyarah Dusturiyah Terhadap Perlindungan Dan Kebebasan Pers Di Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers U." 2(1): 1–202.

agama, karena salah satu pilar dasar bertujuan untuk keselamatan masyarakat dan manusia.⁵⁵ Kebebasan dalam beragama merupakan sebuah penghargaan Al-Qur'an yang dianugerahkan Allah SWT untuk setiap individu.⁵⁶ Al-Qur'an juga menekankan adanya kebebasan dalam beragama. Hal ini dikarenakan iman, yang mana yang dipilih dan dipercayai melalui hati nurani merupakan tindakan ikhlas tanpa paksaan. Keimanan yang ikhlas merupakan kepuasan dan bukan sebuah keterpaksaan. Kebebasan beragama dalam Islam tidak hanya melepaskan individu memilih agamanya, akan tetapi memberi kebebasan bagi pemeluknya untuk menjalankan ibadah ajaran agama yang dipilih.

3) Penerapan demokrasi

Pada pasca orde baru, banyak gerakan reformasi masyarakat yang menuntut aktualisasi demokrasi dan HAM. Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak pernah membahas demokrasi secara tersurat., akan tetapi secara tersirat di dalam Al-Qur'an membahas mengenai prinsip dan nilai dasar yang bisa dijadikan dasaran dalam berdemokrasi. Seperti prinsip kepemimpinan, kepastian hukum, musyawarah, keadilan, kebebasan dan banyak lagi prinsip yang bisa dijadikan dasar demokrasi di Indonesia.

Demokrasi menurut fiqh siyasah suatu kekuasaan tertinggi yang berasal dari Tuhan, kekuasaan berada ditangan syara' bukan rakyat. Demokrasi secara universal memiliki kesamaan dengan nilai demokrasi yang ada dalam Islam, yang membedakan hanya pada ukuran implementasi dilapangan, di mana para aktor demokrasi sendiri kadang berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai sudah ada

⁵⁵ Putri, Dita. 2019. "Siyasah Syar'iah Abu Bakar As Shiddiq Tentang Kebebasan Beragama (Analisis Praktek Kebebasan Beragama Di Indonesia)." 1(1): 1–206.

⁵⁶ Yusuf, Muhammad sayyid. 2002. *Manhaj Al-Quran Al Karim Fi Islah Al-Mujtama*. Kairo: Dar al-Salam. Hal, 183.

didemokrasi itu sendiri.⁵⁷ Dengan begitu bisa diambil kesimpulan bahwa demokrasi yang diperjuangkan Amien Rais untu menyesuaikan nilai-nilai yang ada dalam demokrasi dengan nilai-nilai demokrasi di dalam Islam, yang mana menurut fiqh siyasah hal tersebut dibenarkan.



⁵⁷ Zamri, Ahmad Rizaldin. 2019. "Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*: 1–72.